



LAPORAN PELAKSANAAN **18 ASPEK SPBE**

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT





DRAFT

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional.

2023

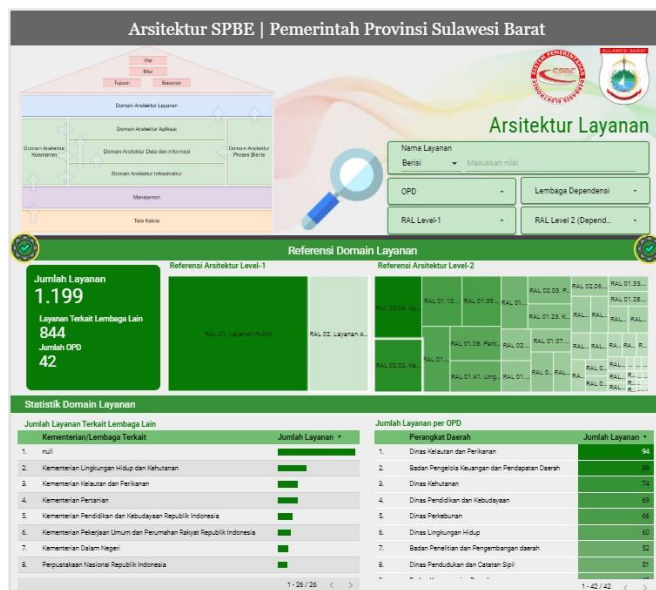
- Draft sudah final
- Target selesai bulan MEI
- Menjadi pengungkit poin indeks SPBE Prov Sulbar

2024

- Dasar hukum penerapan SPBE Pemprov
- Implementasi SPBE 80 %

Arsitektur dan Peta rencana SPBE

Dinas PMD belum menyelesaikan revisi metadata

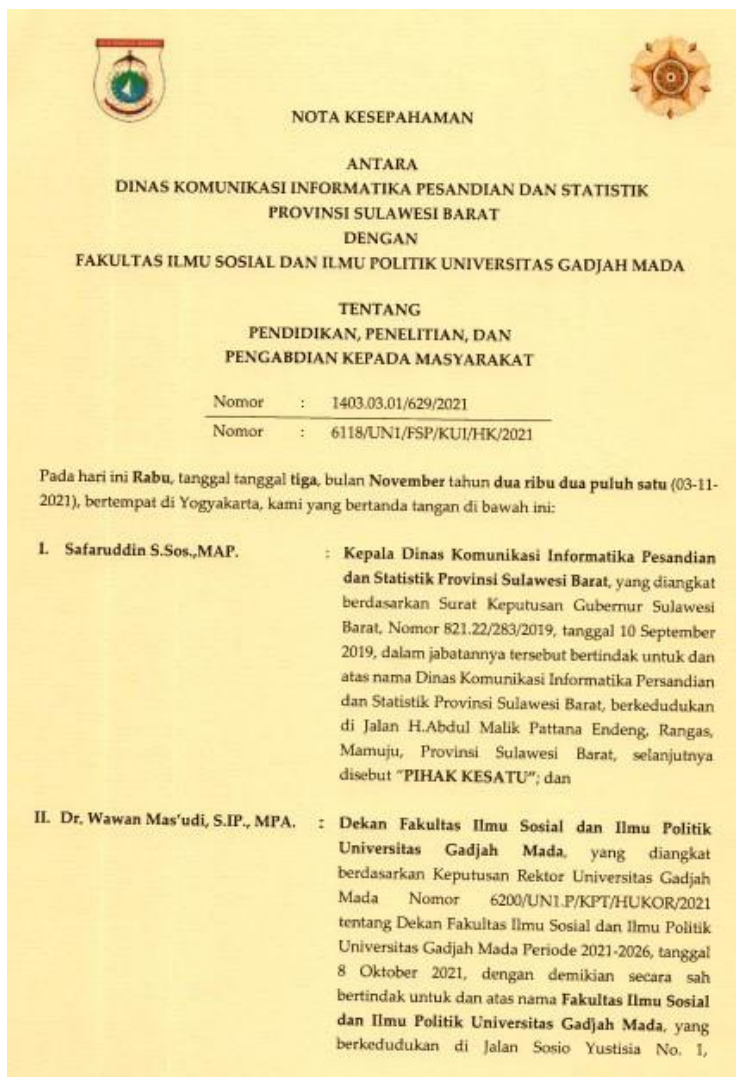


2023

- Menjadi panduan operasional penerapan transformasi digital pemprov yang terintegrasi
- Selesai revisi bulan MEI
- Kerjasama CfDS UGM
- Dokumen arsitektur bersifat dinamis dan dikelola dalam aplikasi
- Terhubung dan sinkron dengan arsitektur SPBE Nasional melalui aplikasi SIA KemenpanRB

2024

- Implementasi 90%
- Penyelarasan metadata terhadap perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan pemprov
- Penerapan peta rencana khususnya pada integrasi aplikasi layanan



2023

- Menyusun SOP Keterpaduan Rencana dan Anggaran
- Menyusun SOP Pembangunan aplikasi SPBE
- Menyusun SOP Layanan pusat data
- Menyusun SOP Sistem penghubung layanan
- Pendampingan pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE dengan tools BRIN
- Membuat pedoman manajemen resiko SPBE
- Membuat pedoman manajemen data SPBE
- Dikerjakan bersama CfDS UGM

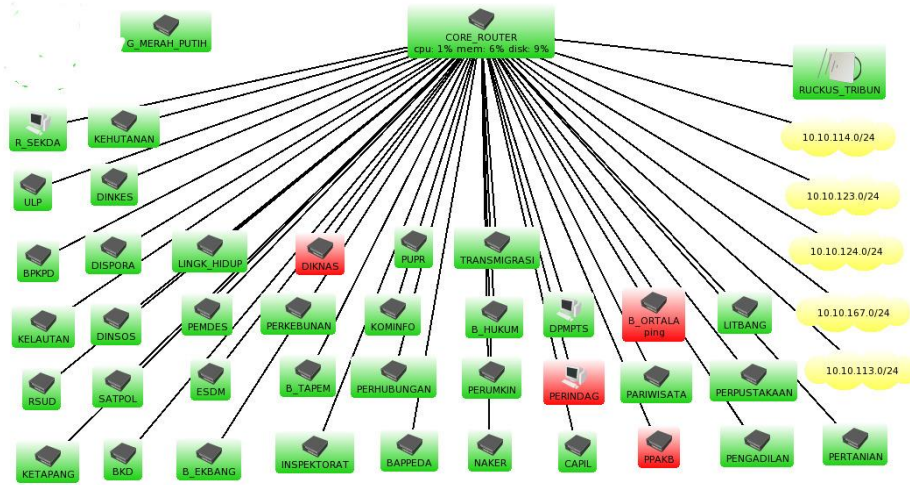
2024

- Implementasi 90%
- Pemenuhan aspek dalam indikator SPBE yang belum direalisasikan

4

Infrastruktur Jaringan Intra

Perlu penegasan pemenuhan standar perangkat jaringan intra kepada 11 OPD dan rujab yang BELUM sesuai rekomendasi



Acces point
min. 3 unit



2023

Provinsi

- Terkoneksi 36 OPD & 7 rujab
- Seluruh gedung dalam Kompleks Perkantoran Gubernur telah terkoneksi jaringan kabel FO

OPD

- 29 OPD sudah memenuhi standar perangkat jaringan & 2 rujab
- 11 OPD yang BELUM Memenuhi Standar Teknis Perangkat Jaringan Intra: BPSPDM, BADAN KESBANGPOL, BIRO BARJAS, BIRO UMUM, DINAS ESDM, DINAS DUKCAPIL, DINAS PMPD, DINAS DAGPERINKOP, BPBD, SEKRETARIAT DPRD, DINAS PERUMKIN

2024

- Peremajaan perangkat jaringan utama
- Pembangunan koneksi digital antar Pemprov dengan 6 Pemkab
- Pembuatan monopole tower untuk perluasan jaringan wireless

*Server masih tersebar di 8 OPD 17 unit
kapasitas 20,2TB*



2023

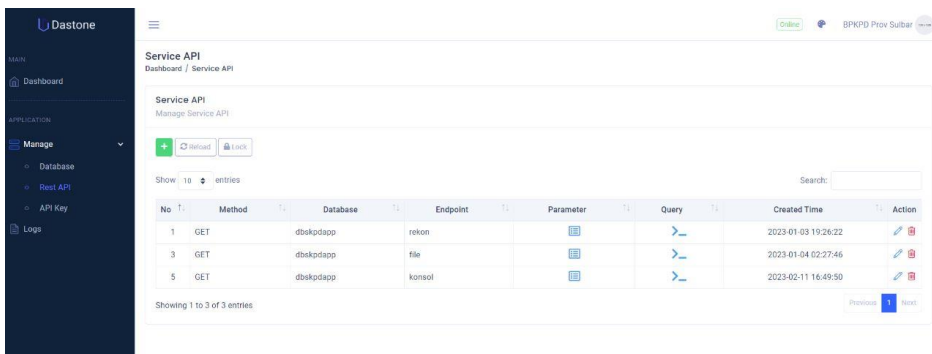
- 17 unit kapasitas 22,2 TB
- Tambahan kapasitas 96 TB
- Pembuatan ruangan Data Center (DC) di lantai 4 Gedung Gadis
- Membuat ruang Network Operation Center (NOC) di kantor Diskominfo
- Pengadaan rak server 2 unit

2024

- Tambahan kapasitas 100 TB
- Penambahan fasilitas pendukung ruangan data center
- Menyiapkan ruang DC di gedung baru kantor Gubernur
- Menjadikan ruang *Disaster Recovery Center* (DRC) di lantai 4 Gedung Gadis

6

Aplikasi dan Sistem Penghubung Layanan



Service API
Dashboard / Service API

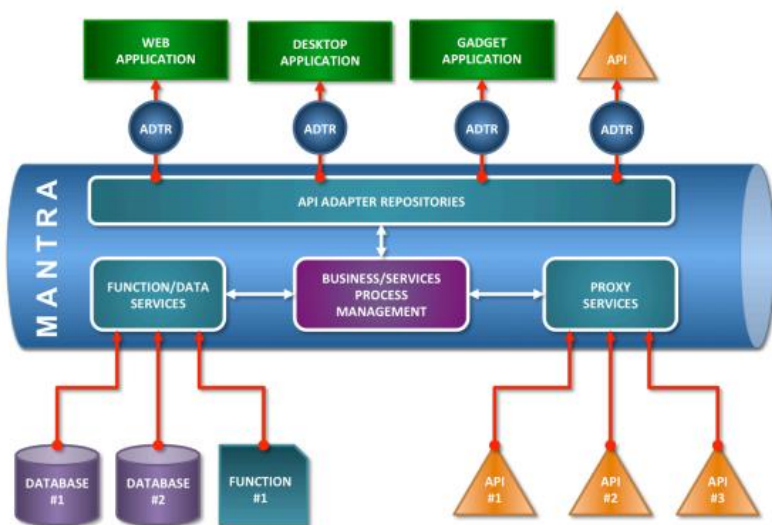
Service API
Manage Service API

Show: 10 entries

No	Method	Database	Endpoint	Parameter	Query	Created Time	Action
1	GET	dbskpdapp	rekon			2023-01-03 10:26:22	
3	GET	dbskpdapp	file			2023-01-04 02:27:46	
5	GET	dbskpdapp	konsol			2023-02-11 16:49:50	

Showing 1 to 3 of 3 entries

ARSITEKTUR SOA PADA APLIKASI MANTRA



2023

- **APLIKASI AKTIF**
 - 4 Aplikasi Umum
 - 30 Aplikasi khusus pada 21 OPD
- Aplikasi yang saling terhubung:
 - Sipamandar-ekoreksi
 - Simrs-Whatsappboot
 - Sipamandar-BPD Sulsebar
- Akan dikerjakan sesuai rekomendasi peta rencana SPBE

2024

- Penyediaan aplikasi berdasarkan peta rencana pada seluruh OPD
- Memaksimalkan keterhubungan antar aplikasi untuk efisiensi penggunaan dengan integrase pada satu portal akses
- Meminimalkan jumlah aplikasi dan memaksimalkan fungsi/fitur pada setiap aplikasi pendukung urusan

7

Pengelola SPBE

Pimpinan perlu menekankan optimalisasi perhatian dan kinerja tim Pengelola SPBE OPD



2023

2024

Provinsi

- Tim Koordinasi SPBE: 13 Orang
- Tim Asesor internal: 8 Orang
- Tim Teknis SPBE Provinsi: 25 Orang
- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD: 34 orang

- Tim Koordinasi SPBE: 20 Orang
- Tim Asesor internal: 15 Orang
- Tim Teknis SPBE Provinsi: 15 Orang
- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD: 20 Orang
- Jasa IT Support SPBE: 15 orang

OPD

Tim pengelola SPBE/pengelola website OPD: 8 orang

Tim pengelola SPBE/pengelola website OPD: 8 orang

8

SDM SPBE

Perlu dukungan kebijakan penyediaan jasa IT support SPBE dan pembiayaannya



2023

2024

Provinsi

- GCIO 1 orang
- Manager/Analisis 4 orang
- Programmer 5 orang
- Jaringan 5 orang
- Multimedia 5 orang
- Helpdesk 3 orang

Jasa IT Support SPBE

- Software Engineer
- Software Developer
- Network Engineer
- Database Administrator
- Network Administrator
- Graphic Desain
- Video Editor
- Web Developer
- Data Analyst
- Content Creator
- Helpdesk

OPD

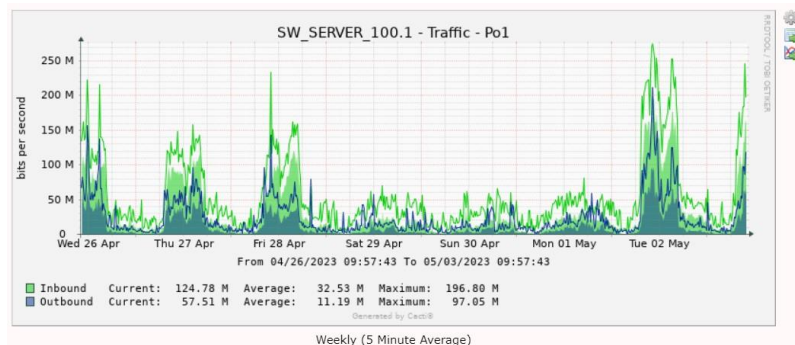
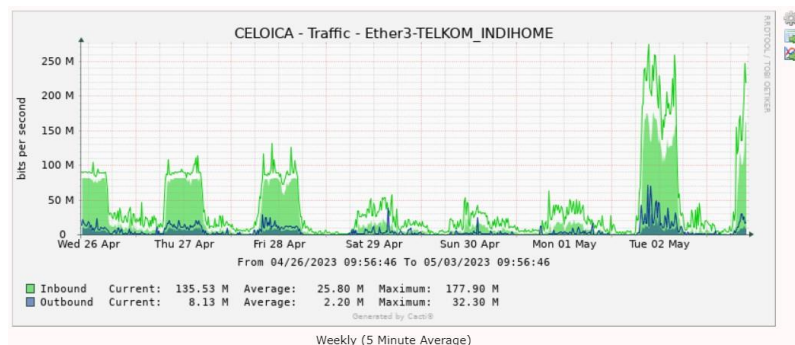
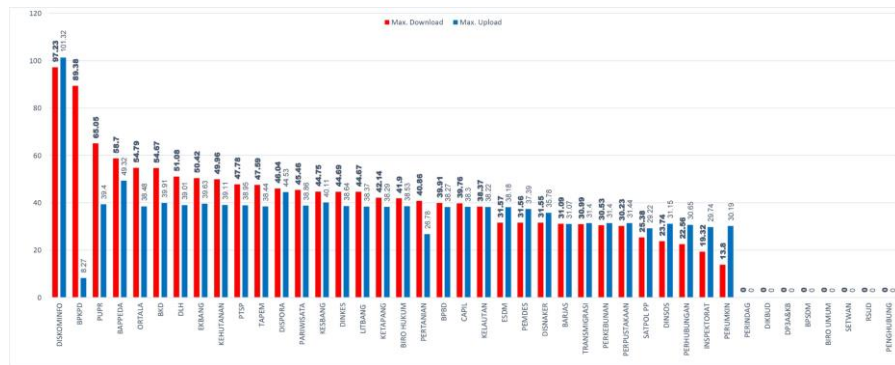
Rata-rata 3 orang

Perlu penambahan kuantitas dan kualitas personil SDM teknis SPBE OPD

9

Internet

Perlu tambahan Pagu khusus internet yang digunakan bersama dengan jumlah kapasitas yang harus meningkat



2023

User:
40 OPD / 2.000 orang
7 Rujab / 200 orang
Total 47 Gedung / 2.200 orang

Max. : 2.000 Mbps
Avg. : 1.000 Mbps
Min. : 800 Mbps

2 provider:
Telkom: 100 Mbps dedicated
up to 400 Mbps broadband

Iconplus: up to 500 Mbps
broadband

2024

User:
40 OPD / 2.000 orang
7 Rujab / 200 orang
Total 47 Gedung / 2.200 orang

Max. : 3.000 Mbps
Avg. : 1.500 Mbps
Min. : 1.000 Mbps

3 provider
Telkom: 50 Mbps dedicated
100 Mbps 1:2
up to 1.000 Mbps broadband

Iconplus: up to 500 Mbps broadband

Non BUMN: up to 1.000 Mbps
broadband



Panduan Pendaftaran Aplikasi *Audit Tools*
Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE

IPPD mengirim email permohonan pendaftaran tertuju ke layananaudit.spbe@bppt.go.id untuk mendapatkan akun dengan melampirkan:

- SK Tim Audit IPPD (*wajib*)
- Kebijakan internal Audit TIK IPPD dan Peta Rencana Audit TIK IPPD (*Optional*)

Admin akan melakukan pengecekan kelengkapan informasi dari dokumen yang dikirimkan. Apabila informasi telah lengkap, maka Admin akan membuat akun sesuai dengan SK Tim Audit. Informasi login diinfokan ke IPPD melalui email.

IPPD yang telah menerima informasi login, dapat melakukan login sesuai dengan peran/hak akses melalui alamat <http://s.id/bppt-tools-audit2>.

IPPD: Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Permohonan Audit TIK diajukan untuk minimal 3 Aplikasi Pelayanan IPPD

2023

Inspektorat, Dinas Kominfo bekerjasama CfDS UGM akan melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE menggunakan *Audit Tools BRIN*

2024

- Memfasilitasi terlaksananya audit keamanan SPBE
- Mendorong Inspektorat menyediakan SDM auditor TIK

Perencanaan & Penganggaran SPBE

SPBE diharapkan menjadi agenda prioritas sesuai RPD termasuk alokasi penganggarnya



2023

Provinsi

Anggaran SPBE provinsi Rp. 4,2 M

- Penyelesaian jaringan intra
- Penyediaan internet terpadu 1.000 Mbps
- Pembiayaan kerjasama pendampingan pembuatan kebijakan SPBE dengan UGM
- Pengembangan SDM pengelola TIK
- Fasilitasi internet desa
- Fasilitasi tata kelola dan manajemen SPBE Provinsi

OPD

- Direkomendasikan biaya SPBE Rp. 100 juta per OPD
- Tidak seluruh OPD membiayai SPBE

2024

Dibutuhkan anggaran SPBE Provinsi Rp. 8,6 M

- Peremajaan perangkat jaringan intra pemprov 28 titik
- Penyediaan internet terpadu 3.000 Mbps
- Pembiayaan jasa IT Support SPBE
- Pengembangan SDM pengelola TIK
- Fasilitasi internet desa
- Fasilitasi tata kelola dan manajemen SPBE Provinsi

Diharapkan setiap OPD membiayai SPBE pada aspek:

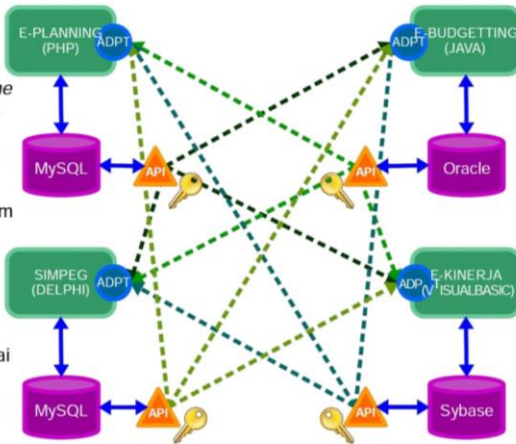
1. Insentif SDM pengelola
2. Penyediaan atau pemeliharaan perangkat jaringan
3. Penganggaran untuk penunjang aktifitas tata kelola dan manajemen SPBE

SOLUSI INTEGRASI DENGAN KONSEP INTEROPERABILITAS

IEEE Glossary:
Interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged.

INTEROPERABILITAS:
Kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data/informasi.

API:
Application Programming Interfaces adalah aplikasi yang berfungsi sebagai penyedia layanan penghubung informasi data antar sistem elektronik menggunakan teknologi Web Services. Dan diakses melalui kunci akses per fungsi layanan.



TUJUAN SATU DATA INDONESIA



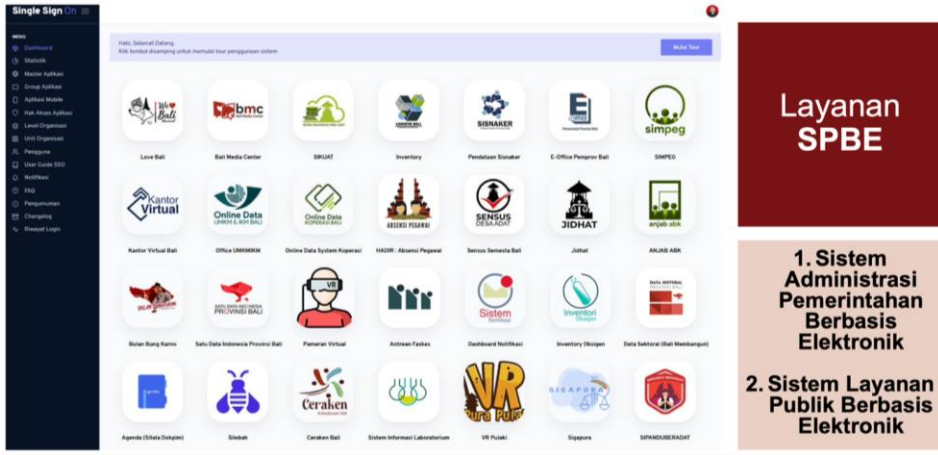
2023

- Koneksi data difasilitasi oleh terselenggaranya sistem penghubung layanan/aplikasi
- Akan dikerjakan sesuai rekomendasi peta rencana SPBE
- Mendukung target Satu Data Nasional

2024

- Didesain sebangun dengan keterhubungan aplikasi layanan
- Mengoptimalkan *cloud computing*
- Memfasilitasi terwujudnya *virtual office*

13 Integrasi Portal Akses Aplikasi Layanan



2023

- Akan dikerjakan sesuai rekomendasi peta rencana SPBE
- Integrasi akses dilakukan untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik

2024

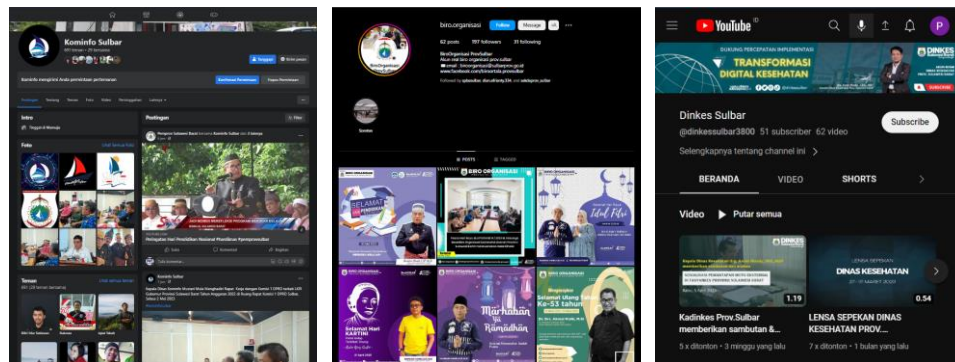
- Memaksimalkan aplikasi layanan publik pada OPD terkait
- Dikerjakan dengan pola *inhouse developer* SPBE (pembangunan aplikasi terpadu secara mandiri).

2023

- Website Kategori KURANG: Dinas Ketapang
- Website Kategori CUKUP: Biro Tapem, Dinsos, Disnaker, Dukcapil, PMD, TPHP, Disbun, Dishut, Transmigrasi, BPBD & Penghubung
- Medsos Kategori PASIF: Dukcapil, ESDM, Transmigrasi, Dinsos, Balitbang & BPBD

2024

- Ditargetkan seluruh website OPD tayang maksimal dengan tampilan menarik dan konten yang padat, lengkap dan terupdate
- Semua OPD menyajikan informasi singkat pada platform media sosial mainstream sesuai kebutuhan informasi terkini





SOPHOS XG 330



2023

- Jaringan dan data digital masih sering mendapat serangan siber
- Telah diadakan alat firewall sebagai benteng pertahanan keamanan jaringan dan data
- Intensifikasi koordinasi teknis Web Administrator Pemprov dan OPD

2024

- Menambah perangkat firewall
- Meningkatkan sistem keamanan dengan penguatan peran CSIRT dan kerjasama BSSN

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Perlu penekanan pimpinan agar OPD segera memperbaiki kinerja dan pembuktian tata kelola SPBE sampai 31 Desember 2023

Hasil Evaluasi SPBE OPD (sementara)

Tahun : 2023
Nama Form : Evaluasi SPBE OPD - 2023
Waktu : 01 Januari 2023 - 31 Maret 2023



Urut	OPD	Pembuktian	Nilai Mandiri	Indeks Final
1	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	100%	4.60	4.34
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	100%	4.40	3.96
3	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	100%	3.82	3.70
4	Biro Umum Setda Prov. Sulbar	100%	3.94	3.54
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	4.28	3.46
6	Dinas Pariwisata Daerah	100%	4.34	3.42
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	100%	3.80	3.42
8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100%	4.10	3.32
9	Dinas Perhubungan Daerah	100%	4.08	3.30
10	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100%	4.54	3.30
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	100%	4.22	3.06
12	Dinas Kehutanan Daerah	100%	3.66	2.94
13	Badan Kepegawaian Daerah	100%	4.68	2.92
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	3.20	2.92
15	Dinas Kesehatan	84%	3.00	2.58
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	100%	3.64	2.42
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	91%	3.40	2.40
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah	100%	3.70	2.34
19	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulbar	100%	4.56	2.34
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	84%	2.90	2.32
21	Inspektorat	100%	4.38	2.28
22	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sulbar	91%	3.94	2.26
23	Dinas Tenaga Kerja Daerah	100%	2.74	2.20
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	100%	4.18	2.06
25	Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulbar	100%	1.76	2.04
26	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	80%	2.50	2.02
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	64%	2.56	1.92
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76%	2.32	1.92
29	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulbar	100%	2.74	1.86
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80%	1.66	1.84
31	Dinas Perkebunan Daerah	100%	4.22	1.62
32	Badan Penghubung	80%	1.56	1.60
33	Dinas PSAPP dan Keluarga Berencana Daerah	96%	2.62	1.32
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	100%	1.94	1.24
35	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	76%	1.94	1.18
36	Dinas Transmigrasi Daerah	100%	3.58	1.16
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0%	0.16	1.08
38	Dinas Sosial Daerah	0%	0.00	1.00
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	0%	0.00	1.00
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	32%	0.78	1.00
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	0%	0.00	1.00
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah	0%	0.00	1.00

Sekretaris Daerah
Ketua Tim Koordinasi SPBE

Dr. Muhammad Idris, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19641115 199303 1 001

2023

- Evaluasi didasarkan pada 25 indikator SPBE OPD
- Hasil evaluasi sementara hingga 31 Maret, terdapat 12 OPD yang memperoleh indeks di bawah 1,8 dan masuk kategori KURANG:
 - Disbun
 - Badan Penghubung
 - Dinas P3APP & KB
 - Dinas ESDM
 - Sekretariat DPRD
 - Dinas Transmigrasi
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Dinas Sosial
 - Kesbangpol
 - Disdikbud
 - PMD
 - Perumkin

- Menjadi salah satu instrumen nilai pembayaran TPP ASN pada aspek prestasi kerja

2024

- Penajaman variabel indikator evaluasi
- Optimalisasi SPBE OPD sebagai subsistem dari ekosistem SPBE provinsi

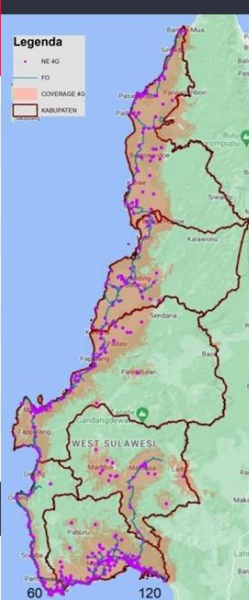
Blank Spot Area/Internet Desa

DATA CAKUPAN SIGNAL SELULER 4G SAMPAI TAHUN 2022 WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Kabupaten	Luas cakupan 4G wilayah (%)	Luas cakupan 4G Pemukiman (%)	Jumlah Desa & Kel
1	Pasangkayu	52,44	99,17	63
2	Mamuju Tengah	40,04	98,54	55
3	Mamuju	28,31	87,41	101
4	Majene	37,30	92,78	82
5	Polewali Mandar	56,41	94,27	167
6	Mamasa	34,79	65,85	181
Total Cakupan Sulbar (%)		41,55	89,67	649
Total Blank spot (%)		58,45	10,33	

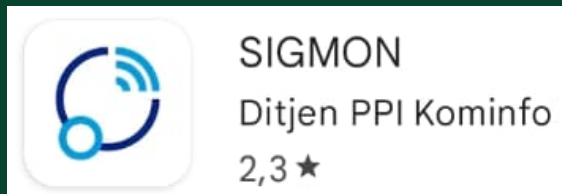
Sumber Data: DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA, KEMENKOMINFO RI
Diolah: DINAS KOMINFO PROV SULBAR

PETA CAKUPAN JARINGAN INFRASTRUKTUR DIGITAL



2023

- Bantuan internet desa 6 titik dari pemprov
- Pemprov telah mendorong seluruh pemkab untuk melaporkan data titik blankspot kepada Kemenkominfo untuk dimintakan bantuan pada aplikasi: **Signal.go.id**



2024

- Rencana bantuan internet desa 6 titik
- Terus mengupayakan penuntasan blankspot desa ke Kemenkominfo untuk pemasangan jaringan berbasis seluler 4G

18

Indeks SPBE Pemprov Sulbar (47 Indikator)

2018

1,46
Kurang

2019

1,61
Kurang

2020

Tidak
Dinilai

2021

2,04
Cukup

2022

2,28

(Cukup)

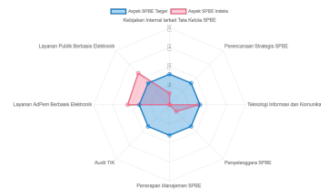
Peringkat 25

Target RPD: 2,20

INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2,28
(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Target RPD

2023

2,35
Cukup

Nama Instansi	Indeks	Predikat	Rank
Pemerintah Provinsi Bali	3.68	Sangat Baik	1
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.67	Sangat Baik	2
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3.42	Baik	3
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.37	Baik	4
Pemerintah Provinsi Lampung	3.37	Baik	5
Pemerintah Provinsi NTT	3.35	Baik	6
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3.34	Baik	7
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.30	Baik	8
Pemerintah Provinsi NTB	3.24	Baik	9
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.18	Baik	10
Pemerintah Provinsi Bengkulu	3.11	Baik	11
Pemerintah Provinsi Banten	3.03	Baik	12
Pemerintah D.I. Yogyakarta	3.02	Baik	13
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3.01	Baik	14
Pemerintah Provinsi Riau	3.00	Baik	15
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2.81	Baik	16
Pemerintah Aceh	2.76	Baik	17
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.68	Baik	18
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2.62	Baik	19
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2.60	Baik	20
Pemerintah Provinsi Gorontalo	2.48	Cukup	21
Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2.47	Cukup	22
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.35	Cukup	23
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2.28	Cukup	24
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2.28	Cukup	25
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2.26	Cukup	26
Pemerintah Provinsi Maluku	2.23	Cukup	27
Pemerintah Provinsi Jambi	2.19	Cukup	28
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2.11	Cukup	29
Pemerintah Provinsi Papua Barat	2.10	Cukup	30
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1.98	Cukup	31
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1.90	Cukup	32
Pemerintah Provinsi Papua	1.88	Cukup	33
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1.74	Kurang	34
	2.73		



**Setiap rencana pengembangan SPBE OPD
disemua aspek agar dikoordinasikan
ke Diskominfo selaku leading sektor SPBE untuk
dikonsolidasikan dengan arsitektur dan peta
rencana SPBE Pemprov. Sulbar agar
pembangunan ekosistem digital dapat
terintegrasi secara konsisten, efisien dan terarah**



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

TERIMA KASIH